

Indonesia

Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari sumber daya alam yang melimpah seperti hutan, karet, minyak dan gas alam, mineral, produk kelapa sawit, dan kekayaan keanekaragaman hayati yang menarik untuk pariwisata alam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 Pemerintah Indonesia merupakan komitmen kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga sudah berjanji untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC) memilih jalur pertumbuhan Indonesia yang ramah lingkungan. Hal yang amat penting bagi tercapainya target-target di atas adalah suatu sistem neraca sumber daya alam (NCA) yang kredibel dan andal untuk menilai keberlanjutan dan ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implementasi NCA dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menerbitkan laporan tahunan Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (SISNERLING).

WAVES di Indonesia

Indonesia bergabung dengan WAVES pada 2013 dan memformulasikan kemitraan pada 2015 dengan harapan bahwa pendekatan yang lebih sistematis terhadap NCA bisa memberi masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Program WAVES saat ini fokus pada empat area utama, yaitu:

1. **Dengan meningkatkan cakupan dan kualitas data SISNERLING**, WAVES mendukung monitoring yang lebih baik terkait bagaimana memanfaatkan aset sumber daya alam Indonesia secara keseluruhan. Kunci dari kegiatan ini adalah desain dan implementasi langkah-langkah monitoring seperti neraca kekayaan yang komprehensif dan *Adjusted Net Savings* (ANS).
2. **Melalui pembentukan neraca nasional berbasis SEEA** untuk cakupan tanah, pemanfaatan tanah dan ekosistem, program WAVES bisa memberi kontribusi dengan mengembangkan pendekatan untuk: (i) mengelola konversi tanah hutan menjadi pertanian dan infrastruktur sebagai akibat dari peningkatan populasi dan kebutuhan pembangunan ekonomi; (ii) menilai tanah non-urban, sebagai dasar untuk menentukan kompensasi finansial pemanfaatan lahan untuk tujuan kepentingan umum; (iii) menyediakan data dan analisis untuk mengelola ekosistem tertentu, khususnya lahan gambut.
3. **Dengan mengembangkan neraca air berbasis SEEA untuk sungai Citarum**, WAVES akan memperkuat pengetahuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kuantitas dan kualitas air, dan menyediakan pendekatan replikasi untuk memproduksi neraca air untuk daerah aliran sungai prioritas dan wilayah-wilayah provinsi.
4. **Dengan mengintegrasikan data ke dalam neraca sumber daya alam**, WAVES membantu menginformasikan berbagai proses pembangunan, terutama untuk RPJMN yang akan datang, rencana strategis NDC, dan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Aktivitas Sejauh Ini

Sejak 2013, WAVES Indonesia telah melakukan beberapa studi kelayakan dan pelingkupan, memulai partnership dan membuka peluang untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan. BPS secara bertahap telah meningkatkan SISNERLING berbasis SEEA versi awal ke SEEA 2012 *Central Framework*, berkat dukungan WAVES, *United Nations Statistics Divisions* (UNSD), *Food and Agricultural Organization of the United Nations* (FAO), *UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN-ESCAP), *Statistics Netherlands*, dan *Australian Bureau of Statistics* (ABS).

WAVES telah mendukung BPS dalam memproduksi beberapa jenis neraca. Proyek percontohan neraca tanah saat ini tengah dilakukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku (hasilnya dipublikasikan di SISNERLING). Neraca-neraca ini akan membantu perencanaan pemanfaatan tanah dan sistem tata kelola, yang terhubung ke sejumlah besar masalah sosial ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya hutan, produksi dan keamanan pangan, dan degradasi lingkungan. Selain itu, WAVES membantu pengembangan neraca air di aliran sungai Citarum, neraca tingkat ekosistem, dan neraca gambut.

Pada akhirnya, program ini bisa memberikan dukungan komunikasi, *knowledge-sharing* antar kementerian, dan pembangunan kapasitas.

Lembaga Pemerintah yang Memimpin WAVES

Kesuksesan WAVES sangat bergantung pada keterlibatan aktif partner utama, termasuk: [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Bappenas\)](#), yang memimpin inisiatif program ini dan mengidentifikasi prioritas kebijakan yang relevan untuk RPJMN 2020 – 2024; BPS; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Badan Restorasi Gambut (BRG); Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Pertanahan Nasional (BPN); dan organisasi masyarakat sipil (ormas), institusi pendidikan, dan media.

Country Steering Committee

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas (Keputusan Nomor KEP/53/DEP.3/10/2017) telah dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari sembilan kementerian / lembaga. *Steering Committee* terdiri dari tiga deputi menteri yaitu dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPS. Di bawah struktur organisasi baru yang didesain untuk memastikan bahwa fokus, partisipasi dan kolaborasi antar kementerian berjalan dengan lebih baik, tim ini bekerja untuk menganalisis pengarusutamaan neraca lingkungan dan ekonomi, serta mengembangkan neraca berdasarkan standar SEEA.

Coordination

Farham Helmy, National Coordinator: fhelmy@worldbank.org

Khairunnisa Rangkuti, Program Officer

Nissa Cita A., Communication Specialist

World Bank Contact

Juan Pablo Castaneda: jpcastaneda@worldbank.org